



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2026



UNIT ESELON I

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 6 Agustus 2026
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,



Wisnu Nugroho Dewanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan Penting Lainnya	61
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Depok, 6 Agustus 2026
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,



Wisnu Nugroho Dewanto

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.686.165.495,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp979.150.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2026 adalah sebesar Rp73.216.203.463,00 atau mencapai 43,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp167.597.533.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.303.253.216.558,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.202.910.492,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.302.014.307.616,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp35.998.450,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.182.051.386,00 dan Rp1.299.071.165.172,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.093.475.742,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp71.393.082.403,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp70.299.606.661,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp599.394.058,00 dan (Rp69.700.212.603,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp69.700.212.603,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.577.162.181.013,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp69.700.212.603,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp6.750.000,00 dan transaksi antar entitas senilai (Rp208.384.053.238,00) kenaikan/penurunan ekuitas (Rp278.091.015.841,00) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp1.299.071.165.172,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2026		%	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		979.150.000	1.686.165.495	172	820.787.011
JUMLAH PENDAPATAN		979.150.000	1.686.165.495	172	820.787.011
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	42.612.637.000	21.577.972.052	51	21.116.057.642
Belanja Barang	B.4	107.791.321.000	46.460.584.756	43	56.340.250.849
Belanja Modal	B.5	17.193.575.000	5.177.646.655	30	2.940.934.650
		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		167.597.533.000	73.216.203.463	43,69	80.397.243.141

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	547.800.000	840.910.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	60.816.460	241.752.644
Piutang Bukan Pajak	C.4	605.220	186.800
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.5	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.6	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	-	-
Persediaan	C.8	593.688.812	457.321.704
Persediaan Belum Register	C.9	-	8.660.300
Jumlah Aset Lancar		1.202.910.492	457.321.704
ASET TETAP			
Tanah	C.10	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.11	161.414.801.381	128.256.573.102
Gedung dan Bangunan	C.12	204.973.925.560	504.520.492.024
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.13	3.675.485.543	13.275.880.497
Aset Tetap Lainnya	C.14	3.194.676.392	3.176.728.792
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	6.172.015.039	-
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.16	(166.416.664.299)	(180.284.611.950)
Jumlah Aset Tetap		1.302.014.307.616	1.557.945.130.465
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.17	3.128.855.133	3.128.855.133
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.18	-	-
Aset Lain-lain	C.19	4.094.829.547	7.920.988.877
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAIN	C.20	(7.187.686.230)	(10.935.688.777)
Jumlah Aset Lainnya		35.998.450	114.155.233
JUMLAH ASET		1.303.253.216.558	1.558.516.607.402
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.21	547.800.000	840.910.000
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.22	2.703.591.814	4.133.672.475
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.23	930.421.372	225.363.349
Pendapatan Diterima Dimuka	C.24	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.25	238.200	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.182.051.386	4.359.035.824
JUMLAH KEWAJIBAN		4.182.051.386	4.359.035.824
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	1.299.071.165.172	1.554.408.171.322
JUMLAH EKUITAS		1.299.071.165.172	1.554.408.171.322

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.093.475.742	58.690.132
JUMLAH PENDAPATAN		1.093.475.742	58.690.132
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	23.941.784.336	22.908.504.796
Beban Persediaan	D.3	552.204.437	537.736.415
Beban Barang dan Jasa	D.4	36.309.707.685	45.531.888.574
Beban Pemeliharaan	D.5	6.731.109.912	10.072.411.086
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.858.276.033	2.156.044.781
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	14.814.108.991
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(144.696)
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		71.393.082.403	96.020.549.947
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(70.299.606.661)	(95.961.859.815)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		269.621.376	578.874.500
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		280.933.362	578.874.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		11.311.986	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional		329.772.682	176.940.796
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		329.772.682	176.940.796
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		599.394.058	755.815.296
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(69.700.212.603)	(95.206.044.519)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(69.700.212.603)	(95.206.044.519)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	1.577.162.181.013	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(69.700.212.603)	(95.206.044.519)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		6.750.000	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	6.750.000	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	208.384.053.238	1.649.614.215.841
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		278.091.015.841	1.554.408.171.322
EKUITAS AKHIR	E.5	1.299.071.165.172	1.554.408.171.322

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Dasar Hukum BPSDM Hukum merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Hukum dengan sebaik-baiknya.

Entitas dan

Rencana Strategis

Kementerian Hukum merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang Hukum, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan Hukum di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang Hukum. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum serta tugas Kementerian Hukum lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang Hukum, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum yang

unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum, tetapi juga sumber daya manusia di bidang Hukum yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan Hukum masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dapat lebih implementatif, adaptif (*relevant*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

- Seluruh aparaturnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 900).

Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Pengyoman Indonesia	1	-	-	-	1
3	12	Balai Pelatihan Hukum Batam	-	1	-	-	1
4	12	Balai Pelatihan Hukum Semarang	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pelatihan Hukum Bitung	-	1	-	-	1
Jumlah			2	3	-	-	5

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan

ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Pendapatan Lain-lain

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2026

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	979.150.000	979.150.000
Pendapatan Lain-lain		-
Jumlah Pendapatan	979.150.000	979.150.000
Belanja		
Belanja Pegawai	41.196.523.000	42.612.637.000
Belanja Barang	135.065.514.000	107.791.321.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	17.519.910.000	17.193.575.000
Jumlah Belanja	193.781.947.000	167.597.533.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp1.686.165.495,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.686.165.495,00 atau mencapai 172,21% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp979.150.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2026		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	150.000.000	576.195.213	384,13
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	829.150.000	780.197.600	94,10
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	-	-
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	329.772.682	100
Jumlah	979.150.000	1.686.165.495	172,21

Realisasi Pendapatan TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 76,1% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2025. Hal ini disebabkan karena satuan kerja baru (Kode Satker Baru) yang aktif di TA 2026.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI 2026	REALISASI 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	576.195.213	644.033.015	-10,53%
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	780.197.600	-	100,00%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	-
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	329.772.682	176.753.996	86,57%
Jumlah	1.686.165.495	820.787.011	105,43%

Rincian Realisasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp576.195.213,00 terdiri dari :

- Realisasi akun (425121) Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari Satker BPSDM Hukum sebesar Rp28.160.000,00 atas pendapatan dari penjualan bongkaran gedung bekas Politeknik Pemasarakatan dan Imigrasi. Dan pada Satker Balai Pendidikan Hukum Bitung sebesar Rp4.400.000,00 atas pendapatan lelang 1 paket material bongkaran BMN berupa Pintu Kaca Alumunium, Kusen Alumunium, Pagar Besi, Baja Ringan, Pintu Kayu, Backdrop dan Kaca Partisi. Nomor Risalah Lelang: 50/16.01/2026-01 Tanggal 17 Maret 2026.
- Realisasi akun (425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp248.373.362,00 berasal dari satker :
 - 1) BPSDM Hukum sebesar Rp175.800.250,00 berasal dari Pendapatan atas Penjualan 2 unit Mini Bus dan 2 unit Sepeda Motor.
 - 2) Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp71.257.500,00 berupa Pendapatan penjualan lelang BMN rusak berupa Stationary Generation Set.

- 3) Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp1.315.612,00 berupa pendapatan dari penjualan lelang BMN rusak berat berupa Unit Power Supply, Kursi, Mesin Absen, Locker, TV, AC Split, PC dan Meja Kayu.
- Realisasi akun (425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp183.375.000,00 berasal dari Satker BPSDM Hukum berupa pendapatan atas sewa Auditorium, Ruang Kelas, Kamar Asrama dan Flat.
- Realisasi akun (425151) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp111.886.851,00 berasal dari :
 - 1) BPSDM Hukum sebesar Rp110.076.851,00 berupa pendapatan atas sewa Kamar Asrama dan Flat.
 - 2) Balai Pendidikan Hukum Semarang Rp1.810.000,00 berupa pendapatan atas sewa Rumah Dinas.
2. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (425429) sebesar Rp780.197.600,00 berasal dari Pendapatan dari penyelenggaraan penilaian kompetensi JF Perancang, JF Analis Hukum dan JF Penyuluh Hukum Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp176.753.996,00 terdiri dari:
 - Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp28.187.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Satker BPSDM Hukum sebesar Rp28.186.280,00 berupa penerimaan kembali atas pengembalian uang makan pegawai atas temuan audit BPK RI.
 - b. Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp720,00 berupa penerimaan kembali atas potongan sewa rumah tunggakan utang lebih potong lain taperum pegawai.
 - Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp293.865.682,00 terdapat pada Satker BPSDM Hukum pengembalian atas Temuan Pemeriksaan BPK berupa pengembalian perjalanan dinas pegawai dan Pengembalian kelebihan pembayaran Jasa Outsourcing Tenaga Alih Daya TA 2025.

- Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7.720.000,00 yang terdiri dari :
 - 1) Satker BPSDM Hukum sebesar Rp20.000,00 merupakan pengembalian atas kekurangan pengembalian hasil temuan audit BPK RI berupa jasa Konsultansi yang Tidak Sesuai Kontrak pada Pembangunan Gedung Rektorat BPSDM Hukum dan HAM TA 2024 (PT.Primega Saniyya Lestari).
 - 2) Satker Balai Pendidikan Bitung sebesar Rp7.700.000,00 merupakan cicilan atas pengembalian temuan Inspektorat Jendral atas kekurangan volume pembangunan Gedung Asrama 2 Lantai dan Gedung Serba Guna 2 Lantai pada tahun 2021.

B.2. BELANJA

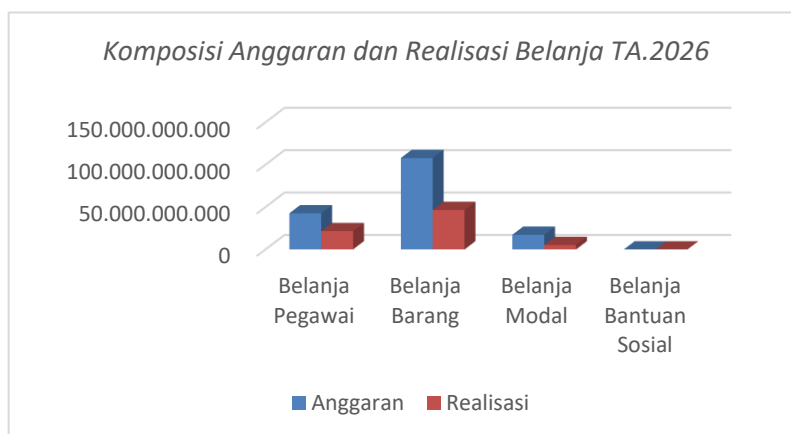
Realisasi Belanja
Rp73.216.203.463,
00

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp73.216.203.463,00 atau 43,69% dari anggaran belanja sebesar Rp167.597.533.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

URAIAN	TA 2025		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	42.612.637.000	21.578.713.681	50,64
Belanja Barang	107.791.321.000	46.462.934.756	43,10
Belanja Modal	17.193.575.000	5.177.646.655	30,11
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	167.597.533.000	73.219.295.092	43,69
Pengembalian Belanja		3.091.629	-
Total Belanja	167.597.533.000	73.216.203.463	43,69

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja pada Semester I Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar (8,93%).

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2026 dan 2025*

URAIAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	21.577.972.052	21.116.057.642,00	2,19%
Belanja Barang	46.460.584.756	56.340.250.849,00	-17,54%
Belanja Modal	5.177.646.655	2.940.934.650,00	76,05%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	73.216.203.463	80.397.243.141	-8,93%

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp21.577.972.052,
00

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp21.577.972.052,00 dan Rp21.116.057.642,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester I Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,08% dibandingkan Tahun Anggaran 2025. Hal ini disebabkan kode satker baru di TA 2026.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025

URAIAN	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	19.444.740.443	19.891.639.457	-2,25%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	936.947.238	661.010.279	41,74%
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	1.197.026.000	575.128.000	108,13%
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	21.578.713.681	21.127.777.736	2,13%
Pengembalian Belanja Pegawai	(741.629)	(11.720.094)	-93,67%
Jumlah Belanja	21.579.455.310	21.139.497.830	2,08%

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 30 Juni 2026

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	24.786.946.000	13.738.728.280	-	13.738.728.280	55,43
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	428.000	201.192	1.629	199.563	47,01
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.396.404.000	869.187.000	-	869.187.000	62,24
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	439.280.000	240.084.281	-	240.084.281	54,65
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	650.310.000	288.540.000	-	288.540.000	44,37
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.974.109.000	1.643.826.000	-	1.643.826.000	55,27
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	297.825.000	272.688.050	-	272.688.050	91,56
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.174.660.000	653.783.640	-	653.783.640	55,66
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.825.613.000	1.461.747.000	-	1.461.747.000	30,29
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	804.895.000	275.955.000	740.000	275.215.000	34,28
512211	Belanja Uang Lembur	2.522.750.000	1.154.900.000	-	1.154.900.000	45,78
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.860.317.000	707.855.760	-	707.855.760	38,05
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	84.000	13.447	-	13.447	16,01
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	93.520.000	31.277.036	-	31.277.036	33,44
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	34.983.000	9.401.388	-	9.401.388	26,87
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	141.451.000	49.400.000	-	49.400.000	34,92
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	87.848.000	35.998.775	-	35.998.775	40,98
511628	Belanja Uang Makan PPPK	345.088.000	90.180.000	-	90.180.000	26,13
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	25.233.000	12.820.832	-	12.820.832	50,81
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	150.893.000	42.126.000	-	42.126.000	27,92
JUMLAH		42.612.637.000	21.578.713.681	741.629	21.577.972.052	50,64

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 30 Juni TA 2026 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp741.629,00 dengan rincian:

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp740.573,00 atas pengembalian pembulatan gaji PNS sebesar Rp573,00 dan

tunjangan umum PNS sebesar Rp740.000,00.

- Satker Politeknik Pengayoman Indonesia sebesar Rp935,00 atas pengembalian pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp8,00 atas belanja pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp113 atas belanja pembulatan gaji PNS.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp46.460.584.756,
00

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp46.460.584.756,00 dan Rp56.340.250.849,00.

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar (17,53%) dari Semester I TA 2025. Hal ini disebabkan kode satker baru di TA 2026.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2026 dan 2025

URAIAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	18.325.510.224	12.595.056.240	45,50%
Belanja Barang Non Operasional	7.419.047.003	22.426.618.590	-66,92%
Belanja Persediaan	191.769.848	317.239.873	-39,55%
Belanja Jasa	9.906.010.831	9.452.845.603	4,79%
Belanja Pemeliharaan	6.772.978.817	9.405.645.762	-27,99%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.847.618.033	2.142.844.781	79,56%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	46.462.934.756	56.340.250.849	-17,53%
Pengembalian Belanja	2.350.000	-	100%
Jumlah Belanja	46.460.584.756	56.340.250.849	-17,54%

Realisasi Anggaran Belanja Barang per 30 Juni 2026

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	40.748.187.000	18.325.510.224	-	18.325.510.224	44,97
5212	Belanja Barang Non Operasional	21.339.258.000	7.419.047.003	-	7.419.047.003	34,77
5218	Belanja Barang Persediaan	527.261.000	191.769.848	-	191.769.848	36,37
5221	Belanja Jasa	23.780.731.000	9.906.010.831	300.000	9.905.710.831	41,66
5231	Belanja Pemeliharaan	14.819.078.000	6.772.978.817	-	6.772.978.817	45,70
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.576.806.000	3.847.618.033	2.050.000	3.845.568.033	58,50
		107.791.321.000	46.462.934.756	2.350.000	46.460.584.756	43,10

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat Pengembalian sebesar Rp2.050.000,00 pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan sebesar Rp300.000,00 pada Belanja Jasa. Dengan Rincian :

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada BPSDM Hukum sebesar Rp1.720.000,00 atas pengembalian Uang Harian Peserta Kegiatan Lokakarya Penyusunan Kurikulum, RBPP, RBPMP dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis TA. 2026 Sesuai ST Nomor:SDM-UM.0307-04 Tanggal 07 Januari 2026.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp330.000,00 atas pengembalian pada belanja perjalanan dinas pada 25 februari 2026 dikarenakan kesalahan pemotongan pajak perjalanan dinas biasa pada pelatihan keprotokolan.
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi pada Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp300.000,00 atas pengembalian pada belanja jasa profesi pada 25 februari 2026 dikarenakan kesalahan pemotongan PPh tenaga pengajar pelatihan keprotokolan.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal

Rp5.177.646.655,00

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.177.646.655,00 dan Rp2.940.934.650,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester I Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 76,05%% dibandingkan Semester I Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025

URAIAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.789.625	2.940.934.650	-73,45%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.396.857.030	-	100%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.177.646.655	2.940.934.650	76,05%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	5.177.646.655	2.940.934.650	76,05%

*Rincian Realisasi Belanja Barang Modal
per 30 Juni 2026*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.414.615.000	780.789.625	-	780.789.625	55,19
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.555.960.000	4.396.857.030	-	4.396.857.030	28,26
5361	Belanja Modal Lainnya	223.000.000	-	-	-	-
		17.193.575.000	5.177.646.655	0	5.177.646.655	30,11

Rincian Realisasi Belanja Modal pada belanja modal peralatan dan mesin :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp 643.553.625,00 merupakan pembelian atas Tensimeter (7 Buah), Alat Kedokteran Umum Lainnya (10 Dummy) dan P.C Unit (27 Buah).
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam merupakan pembelian atas Laptop (1 buah) dan Peralatan audio visual terdiri dari : Video Switcher 1buah, Lensa Kamera (Wide) 1 buah, Microphone / Wireless Mic 1 buah, Soundcard / Audio Interface 1buah, Flash Kamera 1 buah dan Led Continuos Lighting Studio 1 buah.
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang merupakan pembelian atas alat penghancur kertas (1 buah), P.C Unit (3 buah), Water Heater (1 buah), Microfon (3 buah) dan Print Scan (1 buah).

Rincian Realisasi Belanja Modal pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp4.396.857.030,00 terdapat pada Satker BPSDM Hukum merupakan atas Uang Muka Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung kelas di tahun 2026 sebesar Rp4.252.966.800,00 dan atas Belanja Pengelolaan Kegiatan tahun 2026 sebesar Rp143.890.230,00.

*Belanja Modal
Tanah
Rp0,00*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2026 dan 2025*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 2026	Realisasi 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp780.789.625,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester I Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp780.789.625,00 mengalami penurunan sebesar (73,45%) bila dibandingkan dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.940.934.650,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 dan 2025

URAIAN	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.789.625	2.940.934.650	-73,45%
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	780.789.625	2.940.934.650	-73,45%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	780.789.625	2.940.934.650	-73,45%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp4.396.857.030,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp4.396.857.030,00 dan Rp0,00. Mengalami kenaikan sebesar 100% dikarenakan tahun lalu tidak ada belanja modal gedung bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2026	Realisasi 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.396.857.030	-	100%
Jumlah Belanja Kotor	4.396.857.030	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	4.396.857.030	-	100%

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp0,00*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2026	Realisasi 2025	Naik (Turun) %
Belanja Software	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	-	-	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	-	-	-

B.6 Capaian Output Prioritas Nasional

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp0,00*

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang menjadi pedoman utama kementerian dalam penyusunan target dan sasaran kinerja tahunan, pada Kementerian Hukum terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN Nomor 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Pada BPSDM Hukum terdapat 2 (Dua) Program Prioritas Nasional yaitu Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah serta Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP.

Capaian Output Prioritas Nasional 7
Kementerian Hukum pada BPSDM Hukum untuk Periode yang
Berakhir 30 Juni 2026

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pelatihan Fungsional Analis Hukum Pusat dan Daerah	813.068.000	371.574.288	45,70%	Orang	120	30	25%
Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP	1.643.781.000	789.527.682	48,03%	Orang	246	92	37%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp547.800.000,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp547.800.000,00 dan Rp0,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2026 dan 2025*

Keterangan	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	547.800.000	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)		-
Jumlah	547.800.000	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2026 dan TA 2025*

Keterangan	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp60.816.460,00*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp60.816.460,00 dan Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2026 dan 2025*

Keterangan	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	60.816.460	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	60.816.460	-

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp60.816.460,00 terdapat pada Satker BPSDM Hukum sebesar Rp60.578.260,00 dan pada Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp238.200,00.

Pada satker BPSDM Hukum sebesar Rp60.578.260,00 merupakan atas nimonal belanja pada SPM yang belum didistribusikan seluruhnya ke penerima karena pelatihan belum selesai dan atau terdapat kelebihan nimonal pada SPM belanja namun belum dilakukan pengembalian dana, dengan rincian :

No	Nomor SP2D	Jumlah	Kegiatan
1	00013T	Rp8.550.000	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorarium Narasumber Kegiatan Penyusunan Kurikulum, RBPP, RBPMP dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan TA.2026.
2	00051T	Rp1.360.000	Pembayaran Belanja Barang Honor Tenaga Pengajar Bimbingan, Pembimbing, dan Penguji Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Angkatan I TA 2026.
3	00147T	Rp3.800.000	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorarium Pengajar/Penguji Praktek Pelatihan Teknis Keprotokolan TA. 2026.
4	00166T	Rp176.000	Pembayaran belanja barang, Perjalanan Dinas Fulboard Meeting Peserta dan Narasumber kegiatan penyusunan modul pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli pertama TA 2026.
5	00170T	Rp240.000	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honorarium Tenaga Pengajar dan Penceramah Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan TA.2026.
6	00187T	Rp1.360.000	Pembayaran Belanja Barang berupa Honor Tenaga Pengajar Eksternal dan Internal Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Akt II TA 2026.

7	00219T	Rp285.000	Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Keuangan Bulan Maret 2026 pada BPSDM Hukum TA 2026.
8	00226T	Rp910.000	Pembayaran Belanja Barang berupa Uang Harian dan Tiket Peserta Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP dan KUHP TA 2026.
9	00227T	Rp110.000	Pembayaran Belanja barang Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama.
10	00236T	Rp691.730	Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas kegiatan penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan bagi pegawai di Igkn Kanwil Kemenkum NTB TA 2026.
11	00237T	Rp28.100	Pembayaran belanja barang, Perjalanan dinas penandatanganan PKS Fakultas Hukum UGM dan BPSDM Hukum kegiatan Loakkarya KUHP dan KUHP baru TA 2026.
12	00273T	Rp830.000	Pembayaran belanja barang, Kekurangan perjadiin pada kegiatan penilaian kompetensi bagi pegawai dilingkungan Kanwil Hukum DIY.
13	00274T	Rp1.628.160	Pembayaran Belanja Barang, Perjalanan dinas peserta pelatihan fungsional Analis Hukum Angka XI TA 2026.
14	00284T	Rp200.000	Pembayaran Belanja Barang berupa Honor NS Pakar, Pengajar Eksternal, Pengajar Internal pada Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP dan KUHP Akt. XIV dan XV TA 2026.
15	00286T	Rp256.270	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Penkom dalam rangka Pemetaan Pegawai di Lingk Kanwil Kemenkum NTB T.A 2026.
17	00305T	Rp285.000	Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Keuangan Bulan April pada BPSDM Hukum TA 2026.
18	00411T	Rp2.118.000	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Penilaian Kompetensi Pemetaan Pegawai Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah T.A 2026.
19	00410T	Rp1.660.000	Pembayaran Belanja Barang Honor Tim Panitia Kanwil Penilaian Kompetensi Pemetaan bagi Pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah T.A 2026.
20	00434T	Rp17.920.000	Pembayaran belanja barang, Honor pembimbing, tim penguji seminar dan coach seminar pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama AK XII TA 2026
21	00436T	Rp4.350.000	Pembayaran belanja barang, Honor pembuat naskah ujian dan pemeriksa hasil ujian pada

			Belanja jasa profesi Analis Hukum Ahli Pertama Ak XII TA 2026.
22	00480T	Rp3.400.000	Pembayaran Belanja Barang Honor Narasumber Kegiatan Penilaian kompetensi Mansoskul dan Potensi bagi JPT di Lingk. Kementerian Hukum T.A 2026
23	00481T	Rp1.660.000	Pembayaran Belanja Barang Honor Tim Panitia Kanwil Penilaian Kompetensi Pemetaan Pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara T.A 2026
24	00478T	Rp8.760.000	Pembayaran Belanja Jasa Profesi Berupa Honor Pengajar Eksternal Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Akt. XII TA 2026

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang PNPB
Rp605.220,00

Saldo Piutang PNPB per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp605.220,00 dan Rp0,00. Piutang PNPB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNPB disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNPB
TA 2026 dan 2025

Uraian	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Piutang Lainnya	605.220	-
Jumlah	605.220	-

Piutang Lainnya terdapat pada Politeknik Pengayoaman Indonesia atas potongan gaji terhadap sewa rumah dinas salah satu pegawai Poltekpin, untuk periode gaji bulan Juli 2026.

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Semester I TA 2026*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-

C.6 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
Dimuka
Rp0,00*

Saldo Beban Dibayar di Muka 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2026 dan 2025*

JENIS	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Pembayaran Internet	-	-
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2026 dan 2025*

JENIS	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.8 Persediaan

Persediaan

Rp593.688.812,00

Nilai Persediaan 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp593.688.812,00 dan Rp742.810.112,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan

TA 2026 dan 2025

JENIS	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Barang Konsumsi	471.104.394	657.497.837
Barang untuk Pemeliharaan	118.184.418	80.912.275
Amunisi	4.400.000	4.400.000
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	593.688.812	742.810.112

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.9 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tidak terdapat persediaan belum diregister pada periode sampai dengan 30 Juni 2026.

C.10 Tanah

Tanah

Rp1.089.000.068.
000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.089.000.068.000,00. Aset Tetap Tanah terdiri dari :

- Luas Tanah BPSDM Hukum secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.

- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

Saldo Tanah per 30 Juni 2026 sebesar Rp1.089.000.068.000,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp687.998.681.000;
- Satker Poltekim sebesar Rp0,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp58.851.882.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp16.773.700.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp323.737.178.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung sebesar Rp1.638.627.000,00.

C.11 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*

Rp161.414.801.381,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp161.414.801.381,00 dan Rp128.256.573.102,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	Rp 161.424.010.986
Mutasi tambah:	946.461.395
Saldo Awal	-
Pembelian	826.640.395
Transfer masuk	-
Reklasifikasi Masuk	57.987.000
Likuidasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	25.974.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	35.860.000
Mutasi kurang:	955.671.000
Pencatatan nilai berkurang	25.974.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	871.710.000
Reklasifikasi Keluar	57.987.000
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2026	Rp 161.414.801.381
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2026	Rp (107.796.904.442)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	Rp 53.617.896.939

Mutasi bertambah sebesar Rp946.461.395,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai dan terdapat likuidasi masuk yang berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp689.404.395,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp0,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp45.000.000,00
- Satker Poltekipin sebesar Rp0,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang Rp111.467.000,00
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam Rp64.730.000,00
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung Rp35.860.000,00

Mutasi kurang sebesar Rp955.671.000,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp653.060.000,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp0,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp263.650.000,00;
- Satker Poltekipin sebesar Rp0,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang Rp38.961.000,00

- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam Rp0,00
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung Rp0,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 sebesar Rp161.414.801.381,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp120.087.627.319,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp11.879.402.991,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp11.230.140.945,00;
- Satker Poltekipin sebesar Rp0,00
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp 8.095.601.161,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp4.460.835.040,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum senilai Rp5.661.193.925,00.

C.12 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan*

*Rp204.973.925.560,
00*

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp204.973.925.560,00 dan Rp504.520.492.024,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	504.132.396.836
Mutasi tambah:	-
Likuidasi Masuk	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	299.158.471.276
Transfer Keluar	299.158.471.276
Saldo per 30 Juni 2026	204.973.925.560
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(54.072.455.199)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	150.901.470.361

Saldo awal per 01 Januari 2026 pada BPSDM Hukum sebagai Unit Eselon I sebesar Rp504.132.396.836,00. Tidak terdapat nilai Mutasi Tambah pada periode sampai dengan 30 Juni 2026 pada BPSDM Hukum Unit Eselon I. Terdapat mutasi kurang pada unit eselon I BPSDM Hukum Per 30 Juni 2026 sebesar Rp299.158.471.276,00 terdapat pada Satker BPSDM Hukum atas transfer keluar ke BPSDM Imigrasi dan Pemasyrakatan.

Saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp204.973.925.560,00 per 30 Juni 2026 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp125.594.619.872,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp0,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp5.140.133.032,00;
- Satker Poltekin sebesar Rp0,00
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp48.900.340.295,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp13.209.570.057,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung senilai Rp12.129.262.304,00.

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp3.675.485.543,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.675.485.543,00 dan Rp13.275.880.497,00
Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	13.275.880.497
Mutasi tambah:	-
Likuidasi Masuk	-
Mutasi kurang:	9.600.394.954
Transfer Keluar	9.600.394.954
Saldo per 30 Juni 2026	3.675.485.543
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(3.017.557.058)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	657.928.485

Saldo awal per 01 Januari 2026 pada BPSDM Hukum sebagai Unit Eselon I 2026 sebesar Rp13.275.880.497,00. Tidak terdapat mutasi tambah pada Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Terdapat mutasi tambah berupa Transfer Keluar dari satuan kerja BPSDM Hukum kepada BPSDM Imigrasi dan Masyarakat sebesar Rp8.657.297.854,00 atas jalan dan Rp943.097.100,00 atas Instalasi Gardu Listrik.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.675.485.543,00 per 30 Juni 2026 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp3.675.485.543,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp0,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp0,00;
- Satker Poltekin sebesar Rp0,00

- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp0,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp0,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung senilai Rp0,00.

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp3.194.676.392,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp3.194.676.392,00 dan Rp3.194.676.392,00.

Saldo per 01 Januari 2026	3.194.676.392
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Likuidasi Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 30 Juni 2026	3.194.676.392
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2026	(1.529.747.600)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	1.664.928.792

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Saldo Aset tetap Lainnya per 30 Juni 2026 sebesar Rp3.194.676.392,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp1.468.896.867,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp830.088.800,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp867.743.575,00;
- Satker Poltekipin sebesar Rp0,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp7.983.150,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp0,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung sebesar Rp19.964.000,00.

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp6.172.015.039,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.172.015.039,00 dan Rp1.775.158.009,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Terdapat pada Satker

Rp6.172.015.039,00 atas renovasi gedung kelas.

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp166.416.664.
299,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp166.416.664.299,00 dan Rp196.075.310.789,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	161.414.801.381	107.796.904.442	53.617.896.939
2	Gedung dan Bangunan	204.973.925.560	54.072.455.199	150.901.470.361
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.675.485.543	3.017.557.058	657.928.485
4	Aset Tetap Lainnya	3.194.676.392	1.529.747.600	1.664.928.792
Total		373.258.888.876	166.416.664.299	206.842.224.577

C.17 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp3.128.855.133,00*

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3.128.855.133,00 dan Rp3.128.855.133,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 3.128.855.133
2	ATB Lainnya	Rp -
Saldo Per 30 Juni 2026		Rp 3.128.855.133

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	Rp 3.128.855.133
Mutasi tambah:	Rp -
Likuidasi Masuk	Rp -
Pengembangan Apk	Rp -
Pembelian	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian ATB dari Penggunaan	Rp -
Saldo per 30 Juni 2026	Rp 3.128.855.133
Amortisasi s.d 30 Juni 2026	Rp (3.092.856.683)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	Rp 35.998.450

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 sebesar Rp3.128.855.133,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp1.476.732.100,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp652.865.033,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp774.458.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp40.000.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp140.750.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung sebesar Rp44.050.000,00.

C.18 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari dana yang ditentukan untuk membiayai belanja modal yang merupakan hak pemerintah dalam hal ini berasal dari RPATA sebesar Nilai dana yang dibatasi penggunaannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 Rp0,00 dan Rp2.818.105.961,00.

C.19 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp4.094.829.547,00*

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp4.094.829.547,00 dan Rp9.949.747.852,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
TA 2026 dan 2025

Jenis Aset	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	4.094.829.547	9.949.747.852
Jumlah Belanja	4.094.829.547	9.949.747.852

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	9.949.747.852
Mutasi tambah:	871.710.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Asrt Lainnya	871.590.000
Penghentian Aset dari Penggunaan	120.000
Mutasi kurang:	6.726.628.305
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	35.860.000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	6.690.768.305
Saldo per 30 Juni 2026	4.094.829.547
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2026	(4.094.829.547)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-

Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp871.710.000,00 atas reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dan penghentian aset dari penggunaan, dengan rincian mutasi tambah :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp653.060.000,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp218.650.000,00;

Mutasi Kurang aset lain-lain sebesar Rp6.726.628.305,00 atas adanya Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap dan Pencatatan Aset dari Penggunaan, dengan rincian mutasi kurang:

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp6.550.610.779,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp7.236.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung Rp35.860.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp58.287.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp75.830.776,00

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2026 sebesar Rp4.094.829.547,00, berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp2.522.415.500,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp1.097.564.512,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung Rp170.560.000,00;
- Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp304.289.535,00;

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp7.187.686.230,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp7.187.686.230,00 dan Rp13.031.292.549,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	3.128.855.133	3.092.856.683	35.998.450
2	ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah		3.128.855.133	3.092.856.683	35.998.450
B	Aset Lainnya	4.094.829.547	4.094.829.547	-
Jumlah		4.094.829.547	4.094.829.547	-
Total		7.223.684.680	7.187.686.230	35.998.450

C.21 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp547.800.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp547.800.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.22 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp2.703.591.814,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp2.703.591.814,00 dan Rp3.155.514.356,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.363.812.284
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	233.350.500
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	45.850.770
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	60.578.260
Total		Rp 2.703.591.814

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) sebesar Rp2.363.812.284,00 pada :
 - Satker BPSDM Hukum sebesar Rp1.294.058.287,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli;

- Satker Politenik Pengayoman Indonesia sebesar Rp846.149.437,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli;
 - Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp76.320.675,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli;
 - Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp94.717.167,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli;
 - Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung sebesar Rp52.566.718,00 merupakan belanja gaji pegawai yang sudah SPM di Juni untuk pembayaran bulan Juli;
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) sebesar Rp233.350.500,00 pada :
- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp166.750.500,00 merupakan Pembayaran Belanja Barang SPP bulan Juni namun belum SP2D berupa pembayaran atas makan peserta & panitia, pemeliharaan gedung, pemeliharaan halaman, dan sewa pengharum ruangan.
 - Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp66.600.000,00 merupakan Pembayaran Gaji PPPK Paruh waktu bulan Mei dan Juni belum SP2D di bulan Juni 2026.
3. Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) sebesar Rp45.850.770,00 pada Satker BPSDM Hukum yang merupakan Pembayaran belanja modal SPP belum SP2D atas Pengadaan PC Komputer untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Sekretariat BPSDM Hukum TA 2026, Kuitansi Nomor 07/KWI/BPSDM/KC-JKT/VI/2026 tanggal 09 Juni 2026.
4. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp60.578.260,00 terdapat pada Satker BPSDM Hukum sebesar Rp60.578.260,00 merupakan Saldo di rekening bendahara atas pembayaran yang sudah SP2D namun belum didistribusikan ke Penerima;

C.23 Utang yang Belum Diterima Tagihannya

*Utang yang Belum
Diterima
Tagihannya
Rp930.421.372,00*

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp930.421.372,00 dan Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Terdapat pada Satker BPSDM Hukum sebesar Rp74.269.440,00 dan Satker Politeknik Pengayoman Indonesia sebesar Rp856.151.932,00. Merupakan BAST atau SPBy belum SPP.

C.24 Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar dan Rp0,00 dan Rp17.411.071,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB.

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp238.200,00*

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp238.200,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor pada Balai Pelatihan Batam.

C.26 Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.299.071.165.
172,00*

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.299.071.165.172,00 dan Rp1.577.162.181.013,00.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp1.093.475.742,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 1.093.475.742,00 dan Rp58.690.132,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2026 dan 2025

AKUN	URAIAN	TA 2026	TA 2025
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200.786.071	55.150.732
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Tusi)	112.492.071	3.539.400
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	780.197.600	-
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-
425811	Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-
Jumlah	Jumlah	1.093.475.742	58.690.132

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp200.786.071,00 terdapat pada Satker BPSDM atas sewa ATM, sewa Kamar Flat, sewa Kamar Asrama, sewa auditorium;
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) (425151) sebesar Rp112.492.071,00 terdapat pada Satker :
 - 1) Satker BPSDM Hukum sebesar Rp109.429.964,00 atas sewa Kamar Flat dan sewa Kamar Asrama.
 - 2) Satker Politeknik Pengayoman Indonesia sebesar Rp1.252.107,00 atas sewa Rumah Dinas dimana terdapat 2 pegawai masuk dari satker lain yang gajinya masih dipotong atas sewa rumah dinas dan pegawai-pegawai tersebut masih menempati Rumah Dinas tersebut.
 - 3) Satker Balai Pelatihan Hukum Semarang sebesar Rp1.810.000,00 atas sewa Rumah Dinas.
- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (425429) sebesar Rp780.197.600,00 atas Pendapatan dari penyelenggaraan penilaian kompetensi JF Perancang, JF Analis Hukum dan JF Penyuluh Hukum Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Perbandingan PNBP-LO dengan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut.

Perbandingan PNBP-LO dengan PNBP-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
1.093.475.742	1.686.165.495	-592.689.753

Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

URAIAN	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	32.560.000	(32.560.000)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	248.373.362	(248.373.362)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200.786.071	183.375.000	17.411.071
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	112.492.071	111.886.851	605.220
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	-
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	780.197.600	780.197.600	-
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	-
Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	28.187.000	- 28.187.000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	293.865.682	- 293.865.682
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	7.720.000	- 7.720.000
Jumlah	1.093.475.742	1.405.232.133	(592.689.753)

Terdapat Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sebesar (Rp592.689.753,00) merupakan selisih dari :

- Pengakuan Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121) pada PNBP-LRA sebesar Rp32.560.000,00.
- Pengakuan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

(425122) pada PNB-P-LRA sebesar Rp248.373.362,00.

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp17.411.071,00 merupakan selisih atas pengakuan pendapatan PNB-P-LO pada pendapatan diterima dimuka sewa ATM BRI di Satker BPSDM Hukum.
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp602.220 merupakan selisih pengakuan pendapatan PNB-P-LRA atas potongan gaji pegawai atas pembayaran sewa Rumah Dinas dimana SPM gaji sudah diajukan pada bulan Juni 2026 namun belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat pada Satker Politeknik Pengayoman Indonesia.
- Pengakuan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) pada PNB-P-LRA sebesar Rp28.187.000,00.
- Pengakuan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) pada PNB-P-LRA sebesar Rp293.865.682,00.
- Pengakuan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) pada PNB-P-LRA sebesar Rp7.720.000,00.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp23.941.784.336,
00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp23.941.784.336,00 dan Rp22.908.504.796,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2026	TA 2025
Beban Gaji Pokok PNS	15.483.568.740	15.480.969.840
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1.629	2.094
Beban Pembulatan Gaji PNS	225.266	224.533
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	979.619.910	965.974.116
Beban Tunj. Anak PNS	271.370.613	265.634.484
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	2.180.000
Beban Tunj. Struktural PNS	322.870.000	386.710.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.853.353.000	1.708.442.000
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-	5.838.000
Beban Tunj. PPh PNS	279.339.311	267.917.539
Beban Tunj. Beras PNS	737.002.270	739.536.970
Beban Uang Makan PNS	1.461.747.000	1.447.450.000
Beban Tunjangan Umum PNS	309.135.000	345.445.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-740.000	3.700.000
Beban Gaji Pokok PPPK	800.126.760	568.568.562
Beban Pembulatan Gaji PPPK	15.046	8.502
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	35.396.366	21.985.019
Beban Tunjangan Anak PPPK	10.638.776	5.282.668
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	55.575.000	55.060.412
Beban Tunjangan Beras PPPK	40.706.075	24.182.245
Beban Uang Makan PPPK	90.180.000	61.705.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	14.630.832	-
Beban Uang Lembur	1.154.900.000	563.413.000
Beban Uang Lembur PPPK	42.126.000	11.715.000
Jumlah	23.941.784.336	22.908.504.796

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Beban Beban Pegawai-LO	Beban Belanja Pegawai-LRA	Selisih
23.941.784.336	21.577.972.052	2.363.812.284

Terdapat selisih beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA sebesar Rp2.363.812.284,00 dikarenakan sudah masuknya SPM gaji pegawai bulan Juli 2026 namun sampai dengan 30 Juni 2026 belum SP2D.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp552.204.437,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp552.204.437,00 dan Rp537.736.415,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
TA 2026 dan TA 2025*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Beban Persediaan Konsumsi	552.204.437	537.736.415
Jumlah Beban Persediaan	552.204.437	537.736.415

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-
LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

Beban Persediaan-LO	Beban Belanja Persediaan-LRA	Selisih
552.204.437	191.769.848	360.434.589

Terdapat Selisih Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA pada Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp360.434.589,00 Selisih disebabkan karena Beban Persediaan Konsumsi merupakan Beban yang terbentuk dari pemakaian Persediaan Konsumsi dan termasuk dalam Beban pada LO dan tidak masuk dalam Belanja LRA.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp36.309.707.685,00

Beban barang dan jasa pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp36.309.707.685,00 dan Rp57.629.760.807,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2026 dan 2025*

URAIAN	TA 2026	TA 2025
Beban Keperluan Perkantoran	13.131.798.693	12.358.216.952
Beban Pengadaan Bahan Makanan	5.788.797.300	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.000	628.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	177.900.000	282.576.000
Beban Barang Operasional Lainnya	155.497.763	152.143.359
Beban Bahan	2.029.463.958	10.244.456.077
Beban Honor Output Kegiatan	385.060.000	182.391.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.044.794.335	13.205.094.230
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.655.000	8.325.000
Beban Langganan Listrik	1.727.705.412	1.745.242.327
Beban Langganan Telepon	9.915.947	8.474.635
Beban Langganan Air	91.425.650	122.846.200
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.778.705.859	2.579.521.863
Beban Jasa Konsultan	98.000.000	-
Beban Sewa	3.460.197.368	1.942.436.592
Pengembalian Jasa Profesi	(300.000)	
Beban Jasa Profesi	1.385.950.000	2.646.018.421
Beban Jasa Lainnya	38.121.400	53.517.918
Jumlah	36.309.707.685	45.531.888.574

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

Beban Beban Barang dan Jasa-LO	Beban Belanja Barang dan Jasa-LRA	Selisih
36.309.707.685	35.650.268.058	659.439.627

Rincian Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan- LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

URAIAN	Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang dan Jasa-LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	13.131.798.693	12.753.085.861	378.712.832
Beban Pengadaan Bahan Makanan	5.788.797.300	5.245.125.600	543.671.700
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.000	19.000	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	177.900.000	177.900.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	155.497.763	149.379.763	6.118.000
Beban Bahan	2.029.463.958	1.986.090.358	43.373.600
Beban Honor Output Kegiatan	385.060.000	383.260.000	1.800.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.044.794.335	5.043.041.645	1.752.690
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.655.000	6.655.000	-
Beban Langganan Listrik	1.727.705.412	2.041.449.036	(313.743.624)
Beban Langganan Telepon	9.915.947	11.269.568	(1.353.621)
Beban Langganan Air	91.425.650	113.736.800	(22.311.150)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2.778.705.859	2.777.405.859	1.300.000
Beban Jasa Konsultan	98.000.000	98.000.000	-
Beban Sewa	3.460.197.368	3.442.778.168	17.419.200
Pengembalian Jasa Profesi	(300.000)	(300.000)	-
Beban Jasa Profesi	1.385.950.000	1.383.250.000	2.700.000
Beban Jasa Lainnya	38.121.400	38.121.400	-
Jumlah	36.309.707.685	35.650.268.058	659.439.627

Terhadap selisih tersebut merupakan belanja barang atau jasa yang sudah terbit SPM pada bulan Juni 2026 namun belum terbit SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan

Rp6.731.109.912,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.731.109.912,00 dan Rp10.072.411.086,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2026 dan 2025

URAIAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.510.581.262	8.085.066.046
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	748.388.266
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	983.030.822	953.599.455
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	237.497.828	285.357.319
Jumlah	6.731.109.912	10.072.411.086

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja
Pemeliharaan-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

Beban Beban Pemeliharaan-LO	Beban Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
6.731.109.912	6.772.978.817	- 41.868.905

Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja
Pemeliharaan-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

URAIAN	Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.510.581.262	5.369.517.962	141.063.300
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	404.030.783	(404.030.783)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	983.030.822	983.030.822	-
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	16.399.250	(16.399.250)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	237.497.828	-	237.497.828
Jumlah	6.731.109.912	6.772.978.817	(41.868.905)

Terdapat selisih Beban Pemeliharaan-LO dan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar (Rp41.868.905,00), dengan rincian :

- Selisih pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp141.063.300 merupakan selisih atas belanja yang sudah terbit SPM pada bulan juni 2026 namun belum terbit SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.
- Selisih pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp404.030.783,00 merupakan Belanja membentuk persediaan pemeliharaan dan pemakaian persediaan yang membentuk beban pemeliharaan.
- Selisih pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.399.250,00 merupakan Belanja membentuk persediaan pemeliharaan dan pemakaian persediaannya membentuk beban pemeliharaan pada LO.
- Selisih pada Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp237.497.828,00 Pemakaian persediaan yang

membentuk beban di LO namun tidak membentuk belanja pada LRA.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.858.276.033,00*

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3.858.276.033,00 dan Rp2.156.044.781,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2026 dan TA 2025

URAIAN JENIS BEBAN	5Realisasi 2026	Realisasi 2025
Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.663.641.033	2.136.374.781
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	-2.050.000	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.830.000	19.670.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.150.000	
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154.705.000	0
Jumlah	3.858.276.033	2.156.044.781

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

Beban Beban Perjalanan Dinas-LO	Beban Belanja Perjalanan Dinas-LRA	Selisih
3.858.276.033	3.847.618.033	10.658.000

Terdapat selisih sebesar Rp10.658.000,00 pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang sudah terbit SPM pada bulan Juni 2026 namun belum SP2D sampai dengan 30 Juni 2026.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial
Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp0,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.814.108.991,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2026 dan TA 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	7.855.010.660
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	6.341.749.025
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	433.285.455
Beban Penyusutan Irigasi	-	13.157.353
Beban Penyusutan Jaringan	-	11.788.714
Beban Amortisasi Software	-	155.531.784
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	-	3.586.000
Jumlah	-	14.814.108.991

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp144.696,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2026 dan TA 2025*

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	(144.696)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	(144.696)	100%

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

*Beban Lain-lain
Rp0,00*

Jumlah Beban Lain-lain untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp599.394.058,00*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp599.394.058,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2026 dan TA 2025*

URAIAN	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	280.933.362	578.874.500
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(11.311.986)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	329.772.682	176.940.796
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	599.394.058	755.815.296

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Realisasi Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yang diperoleh sebesar Rp280.933.362,00 terdapat pada :

- Realisasi akun (425121) Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp32.560.000,00 berasal dari :

- a) Satker BPSDM Hukum sebesar Rp28.160.000,00 merupakan pendapatan hasil dari Penjualan Bongkaran Renovasi Gedung bekas Politeknik Imgrasi dan Politeknik Pemasyarakatan.
- b) Satker Balai Pelatihan Hukum Bitung sebesar Rp4.400.000,00 berupa Pendapatan atas penjualan bongkaran berupa Pintu Kaca Alumunium, Kusen Alumunium, Pagar Besi, Baja Ringan, Pintu Kayu, Backdrop dan Kaca Partisi.
- Realisasi akun (425122) Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp248.373.362,00 berasal dari satker :
 - a) Satker BPSDM Hukum sebesar Rp175.800.250,00 berupa pendapatan atas Penjualan 2 unit Mini bus dan 2 unit Sepeda Motor.
 - b) Satker Balai Pendidikan Hukum Batam sebesar Rp71.257.500,00 berupa pendapatan atas penjualan 1 unit Stationary Generation Set.
 - c) Satker Balai Pendidikan Semarang sebesar Rp1.315.612,00 berupa pendapatan atas penjualan lelang BMN rusak berat berupa Unit Power Supply, Kursi, Mesin Absen, Locker, TV, AC Split, PC dan Meja Kayu.

Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang diperoleh sebesar Rp329.772.682,00 terdapat pada :

- Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp28.187.000,00 yang terdiri dari :
 - a) Satker BPSDM Hukum sebesar Rp28.186.280,00 berupa penerimaan kembali atas pengembalian uang makan pegawai atas temuan audit BPK RI.
 - b) Satker Balai Pelatihan Hukum Batam sebesar Rp720,00 berupa penerimaan kembali atas potongan sewa rumah tunggakan utang lebih potong lain taperum pegawai.
- Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp293.865.682,00 terdapat pada Satker BPSDM Hukum pengembalian atas Temuan Pemeriksaan BPK berupa pengembalian perjalanan dinas pegawai dan Pengembalian kelebihan pembayaran Jasa Outsourcing Tenaga Alih Daya TA 2025.

- Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp7.720.000,00 yang terdiri dari :
- Satker BPSDM Hukum sebesar Rp20.000,00 merupakan pengembalian atas kekurangan pengembalian hasil temuan audit BPK RI berupa jasa Konsultansi yang Tidak Sesuai Kontrak pada Pembangunan Gedung Rektorat BPSDM Hukum dan HAM TA 2024 (PT.Primega Saniyya Lestari).
- Satker Balai Pendidikan Bitung sebesar Rp7.700.000,00 merupakan cicilan atas pengembalian temuan Inspektorat Jendral atas kekurangan volume pembangunan Gedung Asrama 2 Lantai dan Gedung Serba Guna 2 Lantai pada tahun 2021.

*Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal</i>	E.1 Ekuitas Awal
<i>Rp1.577.162.181.013,00</i>	Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.577.162.181.013,00 dan Rp0,00.
	E.2 Surplus/Defisit LO
<i>Surplus/Defisit LO</i>	Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah defisit sebesar (Rp69.700.212.603,00) dan (Rp95.206.044.519,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>(Rp69.700.212.603,00)</i>	
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i>	E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
<i>Rp0,00</i>	Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.
	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i>	Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Rp0,00</i>	
	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i>	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.
<i>Rp0,00</i>	
	E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset
<i>Koreksi Reklasifikasi Aset</i>	Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok asset tetap ke asset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar dan Rp0,00.
<i>Rp0,00</i>	

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp6.750.000,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.750.000,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi akibat penyusutan transaksional atas ac standing setelah reklasifikasi ke ac portable pada Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
(Rp208.384.053.
238,00)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp208.384.053.238,00) dan Rp1.649.614.215.841,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.686.165.495)
Ditagihkan ke Entitas Lain	73.216.203.463
Transfer Masuk	15.228.534
Transfer Keluar	(279.929.319.740)
Jumlah	(208.384.053.238)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL
(Rp1.686.165.495,
00)/Rp73.216.203.
463,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar (Rp1.686.165.495,00) sedangkan DKEL sebesar Rp73.216.203.463,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp15.228.534,00/
(Rp279.929.319.740
,00)

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp15.228.534,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar (Rp279.929.319.740,00).

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp1.299.071.165.
172,00

Nilai ekuitas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.299.071.165.172,00 dan Rp1.554.408.171.322,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Perubahan Nama Satuan Kerja

Terdapat perubahan nama Satuan Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Hukum dengan rincian sebagai berikut :

Nama Satuan Kerja	
Lama	Baru
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah	Balai Pelatihan Hukum Semarang
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau	Balai Pelatihan Hukum Batam
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Sulawesi Utara	Balai Pelatihan Hukum Bitung

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan penunjukan konsultan perencanaan pembangunan.
2. BPSDM Hukum sedang melakukan proses peralihan nama sertifikat tanah untuk memenuhi ketentuan sertifikat, saat ini masih dalam proses menunggu berita acara hasil pengukuran tanah BPSDM Hukum yang telah dilakukan oleh BPN Depok.
3. Aset tanah pada BPSDM Hukum yang Sertifikatnya Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.
4. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan High Level Meeting Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SEK-PB.03.01-41, SEK-BM.03.01-48, SEK-PB.03.01-48 tanggal 14 April 2026, Terdapat tanah BPSDM Hukum yang digunakan oleh LPKA Kelas II Jakarta, Kepala BPSDM Hukum telah bersurat kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Nomor SDM-

PB.01.01-01 tanggal 5 Januari 2026 Perihal Permohonan Alih Status Penggunaan Bangunan LPKA Kelas II Jakarta. Surat tersebut sudah dtindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal namun sampai dengan pertemuan High Level Meeting antar Kementerian Hukum, Kementerian IMIPAS dan Kemenham tanggal 14 April 2026 yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan terkait Alih Status Penggunaan Bangunan LPKA Jakarta akan dibahas lebih lanjut.

5. Terdapat KDP atas pekerjaan perencana yang telah selesai dilaksanakan terhadap output untuk 3 (tiga) pekerjaan, terdapat potensi atas adanya 2 (dua) output perencanaan yang tercatat di KDP namun tidak dapat dilaksanakan pekerjaan fisiknya karena belum tersedianya anggaran pekerjaan fisik.
6. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan High Level Meeting Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SEK-PB.03.01-41, SEK-BM.03.01-48, SEK-PB.03.01-48 tanggal 14 April 2026. Terdapat penggunaan bersama dan/atau penggunaan sementara pada Balai Pelatihan Hukum Semarang dengan Lapas Kelas I Semarang dengan rincian progres pembahasan sebagai berikut:
 - a) Pihak Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan pihak BPN Kota Semarang dalam rangka pembahasan penyesuaian ukuran tanah. Berdasarkan Surat a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Nomor: B/IP.02.02/791-33.74.200/IV/2026 tanggal 20 April 2026 hal Pemberitahuan Penutupan Berkas No 137551/2025, bahwa setelah dilakukan pengukuran berdasarkan penunjukan fisik di lapangan pada tanggal 03 Februari 2026, diperoleh hasil seluas 42.510 m² namun pada sertipikat Hak Pakai 27/Wates seluas 51.604 m². Bahwa setelah dilakukan identifikasi lapang dan pengolahan data berdasarkan Peta Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Semarang, terindikasi seluas 9.094 m² masuk di dalam HP 2/Wates yang dikuasai oleh Lapas Kelas I Semarang;
 - b) Telah terdapat Surat Kepala Balai Pelatihan Semarang Nomor: W.13.SDM.1.PB.04.06-168 tanggal 28 April 2026 hal Permohonan Petunjuk dan Arahan Terkait Hasil Pengukuran Tanah Balai Pelatihan Hukum Semarang Oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yang ditujukan kepada Sekretaris Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Dalam surat tersebut pihak Balai Pelatihan Hukum meminta petunjuk dan arahan lebih lanjut sebagai dasar penetapan langkah kebijakan dan penyelesaian catatan dimaksud;

- c) Terdapat Surat a.n Sekretaris Jenderal Kepala Biro BMN Nomor: SEK.4-PB.03.03-855 tanggal 6 Mei 2026 hal Petunjuk Tindak Lanjut atas Permasalahan Tanah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Pada surat tersebut pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah bersama Balai Pelatihan Hukum Semarang agar berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Lapas Kelas I Semarang untuk mengajukan usulan penggunaan bersama atas tanah dimaksud.
7. Terkait pemisahan anggaran TA.2026 terhadap satuan kerja Politeknik Pengayoman Indonesia dengan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai dampak atas pemisahan Kementerian/Lembaga, progress hingga saat ini untuk ADK sudah dikirim ke Unit Eselon I dan selanjutnya menunggu Penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu.
8. Pada Satker Politeknik Pengayoman Indonesia Berdasarkan hasil penelaahan pertanggungjawaban keuangan, terdapat ketidaksesuaian narasi detil uraian kegiatan pada Akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) :
 - a) Kegiatan perjalanan dinas pengabdian masyarakat ke Aceh senilai Rp 36.405.200 dan Rp 12.529.250. Kegiatan tersebut merupakan Perjalanan Dinas Biasa dan sudah sesuai akun 524111, namun terdapat kesalahan uraian pada detail kegiatan berupa Biaya Paket Kegiatan Rapat Pertemuan Fullboard di Luar Kantor.
 - b) Transport darat kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN ke BSD, Tangerang Selatan senilai Rp 555.500. Kegiatan tersebut merupakan Perjalanan Dinas Biasa dan sudah sesuai akun 524111, namun terdapat kesalahan uraian pada detail kegiatan berupa Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota PP. Bahwa atas sisa anggaran akun belanja tersebut sudah dilakukan validasi kesesuaian detail kegiatan.
9. Pada Satker Politeknik Pengayoman Indonesia Terdapat pendapatan PNBK Lainnya sebesar Rp 1.252.107 yang disebabkan oleh potongan

sewa rumah dinas atas 2 pegawai mutasi masuk dari Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Wilayah Sumatera Barat. Pada saat kedua pegawai tersebut selesai SKPP Pindah ke satker Poltekpin, yang bersangkutan masih menempati rumah dinas di satker lama nya sehingga pada gaji induk masih terpotong biaya sewa rumah dinas. Atas hal tersebut, maka satker akan melakukan koreksi SPM satker penerima PNBPN yang semula Politeknik Pengayoman Indonesia diubah menjadi Satker Kanwil Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Wilayah Sumatera Barat.